



**KEPUTUSAN FILIPINA MEMBUKA KEMBALI PANGKALAN
MILITER AMERIKA SERIKAT MELALUI PERJANJIAN
ENHANCED DEFENSE COOPERATION AGREEMENT (EDCA)
TAHUN 2014**

*(Philippine's Decision to Reopened United State's Military Base According to
Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) in 2014)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Studi Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana

oleh :

Nur Ardi Setiawan

120910101074

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta saya Ibunda Isnayati S.Pd dan Ayahanda Bambang Tri Widodo
2. Istri saya tercinta Dwi Riastuti S.Pd
3. Adik saya Afrizal Dwi Suastono
4. Keluarga besar pondok Al- Maskuriyyah yang saya banggakan
5. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MOTTO

“If you can't explain it simply, you don't understand it well enough”¹



¹ Albert Einstein. dalam kicauan twitter milik Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump pada 13 Agustus 2014. <https://twitter.com/realdonaldtrump/status/499601930453524481?lang=en>

PERNYATAAN

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ardi Setiawan

NIM : 120910101074

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Filipina Membuka Kembali Pangkalan Militer Amerika Serikat Melalui Perjanjian EDCA tahun 2014” merupakan hasil karya sendiri, menggunakan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari karya ilmiah ini dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bukti dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, Juni 2019

Yang menyatakan

Nur Ardi Setiawan

NIM. 120910101074

SKRIPSI

**KEPUTUSAN FILIPINA MEMBUKA KEMBALI PANGKALAN MILITER
AMERIKA SERIKAT MELALUI PERJANJIAN EDCA TAHUN 2014**

Oleh:

Nur Ardi Setiawan

120910101074

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Keputusan Filipina Membuka Kembali Pangkalan Amerika Serikat Melalui Perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) Tahun 2014” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jum’at 14 Juni 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.
NIP. 196802291998031001

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D
NIP. 196402081989021001

Anggota I

Anggota II

Agus Trihartono, Sos, MA., Ph.D.
NIP. 196908151995121001

Dr. Muhammad Iqbal, Sos., M.Si.
NIP. 197212041999031004

Mengesahkan
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno
NIP. 196106081988021001

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Keputusan Filipina Membuka Kembali Pangkalan Militer Amerika Serikat Melalui Perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) Tahun 2014". Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta perhatian untuk penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
2. Tim penguji ujian skripsi;
3. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di jurusan ini;
4. Orang tua penulis, Bapak Bambang Tri Widodo dan Ibu Isnayati
5. Istri Penulis, Dwi Riastuti
6. Semua pihak yang telah menjadi bagian panjang dalam sebuah perjalanan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis membuka ruang bagi ajakan diskusi, kritik, dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini.

Jember, 14 Juni 2019

Penulis

RINGKASAN

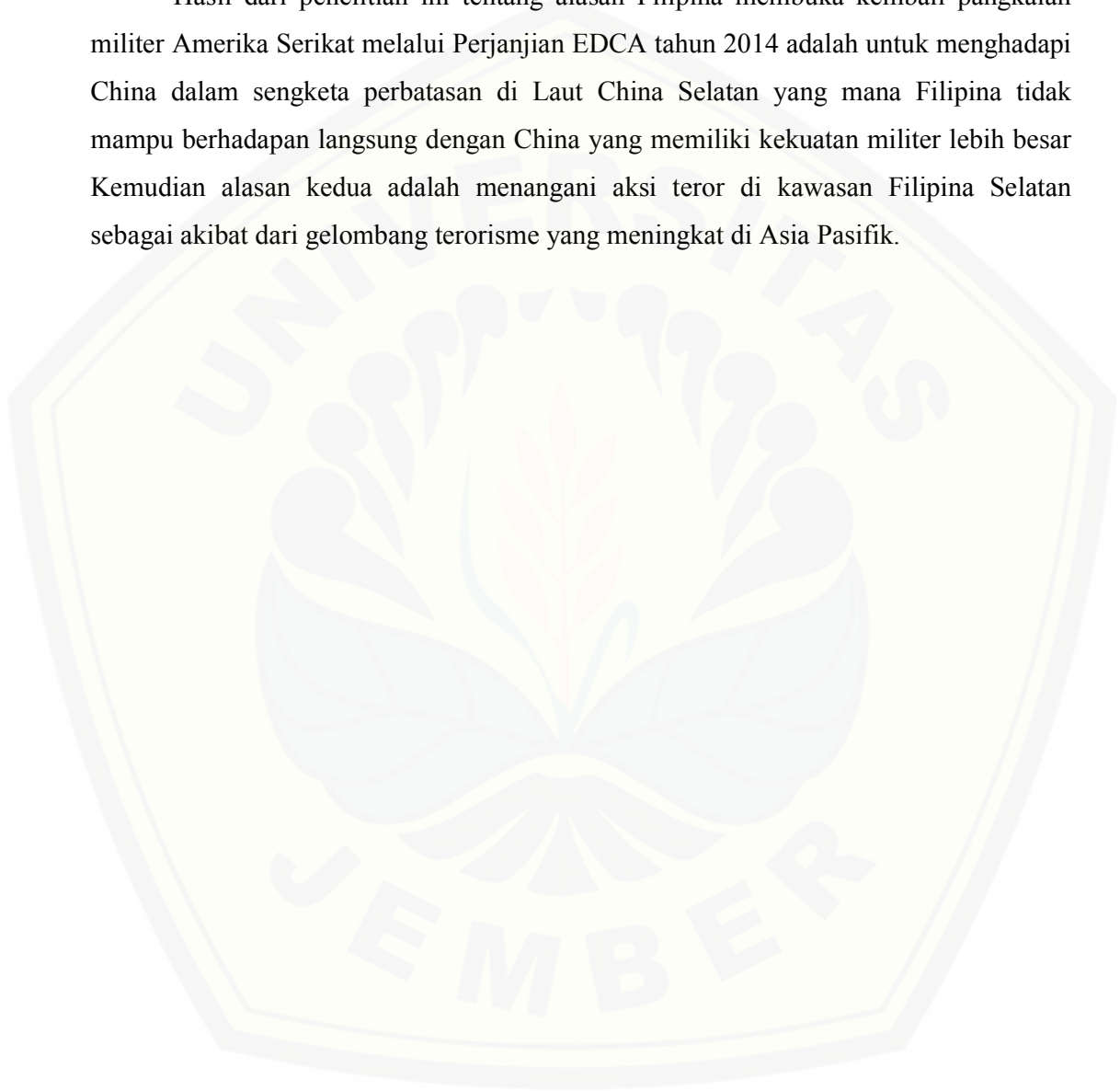
Keputusan Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) tahun 2014; Nur Ardi Setiawan ,120910101074; 60 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Filipina dan Amerika Serikat sudah menjalin hubungan sejak lama. Filipina bagi Amerika Serikat merupakan sekutu yang penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik. Pasca kemerdekaan yang diberikan Amerika Serikat kepada Filipina pada tahun 1946, kedua negara telah melakukan berbagai kerja sama di bidang militer. Salah satunya adalah kerja sama sewa yang digunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai pangkalan militer mereka di kawasan Asia Pasifik. Pangkalan tersebut adalah Subic dan Clark. Filipina dalam kerja sama ini, mendapatkan keuntungan dengan mendapat pelatihan militer dari pasukan Amerika Serikat selama kerja sama tersebut berlangsung yaitu 99 tahun. Tahun 1991 perjanjian sewa lahan yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai pangkalan militer mereka harus dihentikan oleh Pemerintah Filipina dikarenakan hubungan kedua negara mengalami kerenggangan akibat pergantian kepemimpinan. Tahun 2014, tepatnya pada tanggal 28 April, Filipina menerima perjanjian penguatan pertahanan militer dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut diberi nama *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Dalam perjanjian tersebut membahas tentang membawa kembali kehadiran pasukan Amerika Serikat di Filipina dengan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer di Filipina salah satunya milik Amerika Serikat dulu. Kembalinya Pasukan Amerika Serikat ke Filipina dengan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer padahal dulunya telah ditutup membuat penulis tertarik untuk meneliti alasan pemerintah Filipina membuat kebijakan tersebut.

Berdasarkan kejadian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti alasan Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan

data sekunder. Proses pengumpulan data yang diperlukan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi mengenai perjanjian EDCA tahun 2014 dan kerjasama antara Filipina dan Amerika Serikat di bidang militer serta keamanan regional.

Hasil dari penelitian ini tentang alasan Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui Perjanjian EDCA tahun 2014 adalah untuk menghadapi China dalam sengketa perbatasan di Laut China Selatan yang mana Filipina tidak mampu berhadapan langsung dengan China yang memiliki kekuatan militer lebih besar. Kemudian alasan kedua adalah menangani aksi teror di kawasan Filipina Selatan sebagai akibat dari gelombang terorisme yang meningkat di Asia Pasifik.



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 1.1.....	6
Gambar 2.1.....	16
Gambar 2.2.....	23
Gambar 3.1.....	26
Gambar 3.2.....	28
Gambar 3.4.....	34
Gambar 4.1.....	38
Gambar 4.2.....	45

Tabel

Tabel 2.1.....	14
Tabel 4.1.....	40

DAFTAR SINGKATAN



AFP	: <i>Arms Forces of the Philippines</i>
ASG	: <i>Abu Sayyaf Group</i>
CSIS	: <i>Center for Strategic and International Studies</i>
EDCA	: <i>Enhanced Defense Cooperation Agreement</i>
GTI	: <i>Global Terrorist Index</i>
GFP	: <i>Global Fire Power</i>
IEP	: <i>Institute for Economics and Peace</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
JI	: <i>Jemaah Islamiah</i>

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN	v
PRAKATA	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.2.1 Batasan Materi.....	4
1.2.2 Batasan Waktu.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kerangka Konseptual	4
1.6 Argumen Utama	7
1.7 Metode Penelitian	7
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	8
1.8 Sitematika Penulisan	9
BAB 2. PERKEMBANGAN MILITER FILIPINA DAN KERJA SAMA FILIPINA DENGAN AMERIKA SERIKAT DI BIDANG MILITER	10
2.1 Perkembangan Militer Filipina	10
2.1.1 Kekuatan Militer Filipina	12
2.3 Kerja sama Filipina dan Amerika Serikat di Bidang Militer dan Keamanan	15
2.3.1 Kerja sama Filipina dan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Radikal Islam	17
2.3.2 Perjanjian Akses Pangkalan Militer	19

BAB 3. KONDISI LAUT CHINA SELATAN DAN GELOMBANG TERORISME DI KAWASAN ASIA PASIFIK	24
3.1 Kawasan Laut Cina Selatan	24
3.1.1 Kepentingan Filipina di Kawasan Laut China Selatan	29
3.1.2 Konflik Laut China Selatan	30
3.2 Ancaman Terorisme global di kawasan Asia Pasifik	34
3.2.1 Filipina Menjadi Negara Paling Terdampak Gelombang Terorisme	35
BAB 4. ALASAN FILIPINA MEMBUKA KEMBALI PANGKALAN MILITER AMERIKA SERIKAT DALAM PERJANJIAN EDCA TAHUN 2014	37
4.1 Untuk Menghadapi China dalam Konflik Laut China Selatan	38
4.1.1 Kekuatan Militer Filipina Lemah Dibandingkan dengan China	41
4.2 Meningkatnya Konflik Domestik di Kawasan Filipina Selatan	43
BAB 5. KESIMPULAN	46
Daftar Pustaka	48
Lampiran	53

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat sebagai negara sekutu dari Filipina, dijadikan sebagai mitra dalam membangun kekuatan militer mereka. Hubungan kedua negara tersebut sudah lama terjalin. Dahulu Filipina merupakan negara bekas jajahan Amerika Serikat sejak tahun 1899. Kemudian diberi kemerdekaan pada tahun 1946 oleh Amerika Serikat setelah direbut kembali dari Jepang. Pada tahun 1947, Filipina menandatangani perjanjian *Military Assistance Agreement* dengan Amerika Serikat sebagai timbal balik setelah diberi kemerdekaan oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan sewa lahan antara Filipina dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian tersebut Filipina harus menyewakan lahannya untuk digunakan sebagai pangkalan militer milik AS (Kaliwarang 2009). Daerah tersebut ialah Teluk Subic dan Clark. Kemudian sebagai imbalannya Amerika Serikat memberikan latihan militer terhadap tentara Filipina.

Pada tahun 1951, Filipina dan AS kembali menjalin kerja sama militer. Perjanjian tersebut dikenal dengan MDT (Mutual Defense Treaty). MDT merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya yaitu *Military Assistance Agreement* pada tahun 1947. Dalam perjanjian ini membahas program dari Filipina dan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan teritori di wilayah Asia Pasifik selama Perang Dingin (GOVPH 2013). Bagi Amerika Serikat, wilayah Filipina menjadi penting untuk dilindungi karena menjadi tembok terdepan bagi Amerika Serikat di sebelah Utara Asia Tenggara pada waktu itu. Hal ini juga disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Arthur Radford, yang menilai pangkalan militer di Filipina sangat penting bagi kepentingan pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat Daya (Kaliwarang 2009).

Pada tahun 1991, kerja sama militer antara Filipina dan Amerika Serikat berakhir dikarenakan keputusan Senat Filipina yang tidak meratifikasi perjanjian

pangkalan militer baru setelah pergantian rezim antara dari Ferdinand Marcos ke Qory Aquino. Senat Filipina menutup dua pangkalan militer milik Amerika Serikat di Teluk Subic dan Clark (Mukhti 2014). Tahun 1992, militer Amerika Serikat resmi meninggalkan pangkalan udara Clark dan dermaga laut Subic setelah hampir satu abad berada di Filipina. Meskipun telah meninggalkan Filipina, militer Amerika Serikat tetap melakukan hubungan kerja sama militer dengan Filipina. Perjanjian tersebut di antaranya Pasukan Kunjungan pada tahun 1998 dan Perjanjian Dukungan Logistik Timbal Balik pada tahun 2002.

Pada tahun 2011, Filipina membuka kembali kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Pada bulan November 2011, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengunjungi Filipina guna membahas kerja sama pertahanan (MDT) kembali yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak pada tahun 1951 (Whaley 2011). Pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi Manila yang mana ditandatangani oleh Hillary Clinton dan Albert del Rosario di Manila. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa (GOVPH 2012): “*The Republic of the Philippines and the United State today reaffirm our Shared Obligation under the Mutual Defense Treaty*”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Filipina dan Amerika Serikat serius dalam menjalin hubungan mereka kembali seperti dalam perjanjian *Mutual Defense Treaty* (MDT) pada tahun 1951. Isi dari Deklarasi Manila salah satunya adalah menekankan pada kerja sama antara Filipina dan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan regional. Kemudian Deklarasi tersebut ditegaskan dengan pernyataan dari Hillary Clinton pada Mei 2012, yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah setuju untuk menandatangani kembali kerja sama militer dengan Filipina (Whaley 2011). Pada pertemuan kedua ini membahas mengenai komitmen di antara kedua negara yang terkait dengan peningkatan kerja sama di antara keduanya.

Pada tahun 2014, Filipina dan Amerika Serikat kembali menegaskan hubungan mereka dalam kerja sama militer dengan menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* pada 28 April 2014 (Tempo

2014). Perjanjian ini terbentuk menyusul kunjungan Presiden Barrack Obama ke negara – negara Asia pada bulan Maret. *Enhanced Defense Cooperation Agreement* atau EDCA ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin dan Duta Besar AS untuk Filipina Philip Goldberg yang mana perjanjian tersebut berlaku sampai sepuluh tahun kedepan (Tempo 2014).

Dalam kerja sama tersebut, Filipina mengizinkan militer Amerika Serikat untuk mengakses sejumlah pangkalan militer, pelabuhan, dan lapangan udara. Kemudian militer Amerika Serikat juga akan dirotasi dalam mengakses fasilitas tersebut dan melakukan latihan bersama dengan militer Filipina. Fasilitas yang mungkin dapat diakses oleh militer Amerika Serikat adalah pangkalan militer di Manila, Clark, Palawan, Cebu, Nueva Ecij, dan La Union (Jakarta Greater 2014). Perjanjian EDCA yang disepakati oleh Filipina dan Amerika Serikat pada tahun 2014, membuat Filipina kembali membuka pangkalan militer Amerika Serikat yang sempat ditutup pada tahun 1992. Perjanjian EDCA juga membuat kehadiran militer Amerika Serikat kembali meningkat dikawasan Asia Pasifik pasca perang dingin dengan Uni Soviet.

Dari pemaparan latar belakang di atas, keputusan Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat dalam perjanjian EDCA tahun 2014 menarik untuk diteliti. Mengingat pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina pernah ditutup pada tahun 1992 setelah senat Filipina tidak meratifikasi pembaharuan kerja sama antara Filipina dan Amerika Serikat. Pada penelitian ini, Penulis mencoba mencari alasan dari Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014 dengan judul “**Keputusan Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat dalam perjanjian EDCA tahun 2014**”.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan agar pembahasan suatu fenomena tidak meluas dan keluar dari fokus pembahasan, serta akan mengantarkan penelitian menjadi tulisan yang terarah dan sistematis. Pembahasan perlu diarahkan agar sesuai dengan pokok permasalahan serta mempermudah pengumpulan data dan informasi.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk menunjuk atau fokus materi yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian, batasan materi yang digunakan adalah alasan mengapa Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan rentang waktu terjadinya peristiwa atau objek yang dianalisis. Batasan waktu yang ditentukan dalam penelitian ini adalah mulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2011 dipilih karena Filipina dan Amerika Serikat mulai menguatkan hubungan kerja sama militer kembali sejak ditariknya pasukan Amerika Serikat pada tahun 1992. Tahun 2016 dipilih karena Filipina telah membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : **“Mengapa Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan adanya teori maupun konsep sebagai langkah awal. Teori merupakan suatu pernyataan yang digunakan sebagai upaya untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi (Mas'ood 1996). Teori merupakan penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dan kapan suatu peristiwa dapat diperkirakan akan terjadi. Selain sebagai eksplanasi teori juga digunakan sebagai dasar dalam memprediksi sesuatu (Mas'ood

1996). Dalam Skripsi ini, penulis menggunakan Teori pengambilan keputusan dari William D. Coplin.

Menurut William D. Coplin dalam teori pengambilan keputusan, politik luar negeri dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan (Coplin 1992). Tiga pertimbangan tersebut di antaranya adalah:

1. Kondisi politik dalam negeri/politik domestik

Dalam pandangan Coplin, politik dalam negeri suatu negara memiliki peranan penting kaitannya dengan proses pengambilan keputusan politik luar negeri dari negara tersebut. Coplin menjelaskan lebih lanjut terkait politik dalam negeri dengan fokus penjelasan tentang adanya peran aktor-aktor politik dalam penyusunan suatu keputusan politik luar negeri suatu negara. Aktor-aktor tersebut dikenal dengan *policy influencer* (aktor yang mempengaruhi kebijakan). Dalam hal ini *policy influencer* bertindak sebagai faktor pendorong penyusunan suatu politik luar negeri. Aktor tersebut ialah : birokrasi, partai, kelompok kepentingan dan massa.

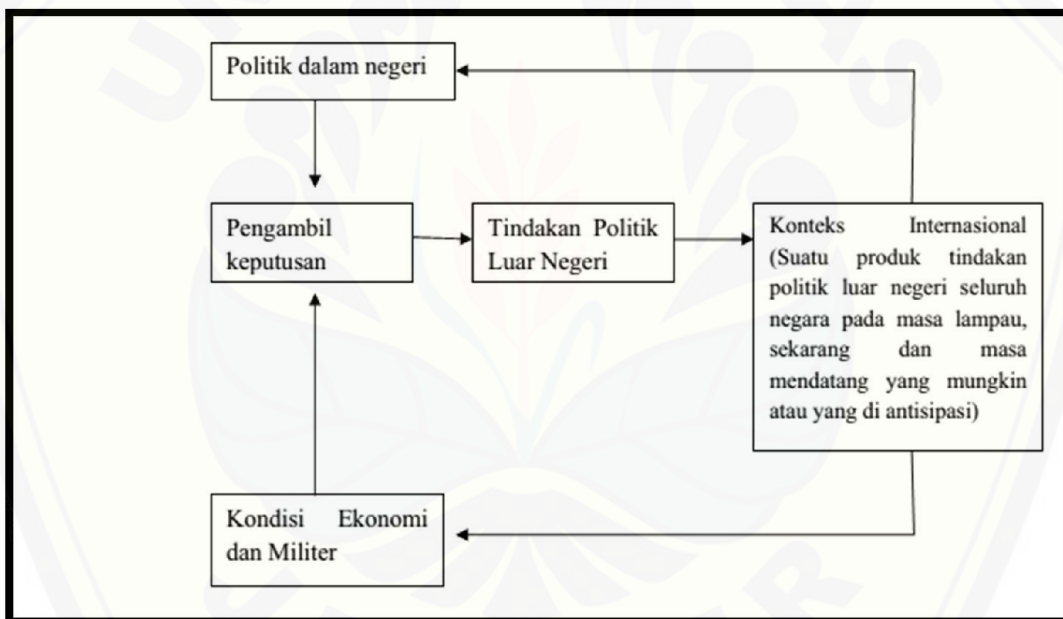
2. Kondisi ekonomi atau militer

Dalam proses penyusunan politik luar negeri, Coplin berasumsi bahwa pertimbangan pada aspek kondisi ekonomi dan militer negara menjadi salah satu faktor pendorong para aktor pembuat keputusan politik luar negeri merumuskan suatu formulasi politik luar negerinya di dunia internasional. Pengambil keputusan luar negeri juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor ekonomi atau militer, serta memperhatikan kelemahan negara dalam penyusunan politik luar negeri. Para pembuat keputusan luar negeri harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang mana diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer.

3. Konteks Internasional

Menurut Coplin, kondisi internasional atau konteks internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri suatu negara. Terdapat tiga elemen utama dalam konteks internasional yang mempengaruhi penyusunan politik luar negeri. Pertama, kondisi geografis, ekonomi dan politik internasional (Coplin 1992).

Dalam pembuatan keputusan politik luar negeri selalu melalui mekanisme politik dimana tuntutan dari domestik politik atau politik dalam negeri, kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer negara, serta pertimbangan kondisi internasional, menjadi tiga determinan yang mempengaruhi hasil dari mekanisme politik tersebut. Untuk lebih jelas memahami tentang proses pembuatan keputusan politik luar negeri seperti yang dijelaskan William D. Coplin, berikut akan ditampilkan model pengambilan keputusan luar negeri.



Gambar 1.1 : Teori Pengambilan Keputusan Willam D. Coplin

Sumber : Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi ke -2

Teori pembuatan keputusan di atas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh adanya konstelasi politik secara internal (politik domestik dan kondisi militer serta militer) dan eksternal (kondisi internasional) yang kondisinya saling mempengaruhi antara satu sama lain dan mendorong para pembuat keputusan

untuk membuat rencana atau formulasi politik luar negeri. Filipina dalam menentukan kebijakan atas pembukaan kembali pangkalan militer milik Amerika Serikat, dikarenakan oleh dua situasi atau kondisi internasional. Kondisi internasional yang pertama merujuk pada konflik perbatasan dengan China di kawasan Laut China Selatan yang mulai kembali meningkat pasca China mengeluarkan peta resmi mereka. Kejadian ini berdampak pada kekuatan ekonomi dan militer Filipina yang terbatas tidak mampu melindungi kedaulatannya, mereka harus bersaing dengan China yang mempunyai kekuatan ekonomi dan militer yang unggul jauh dengan Filipina. Kemudian situasi lain yang merujuk pada gelombang terorisme yang mulai mengarah ke kawasan Asia Pasifik khususnya Filipina Selatan.

1.6 Argumen Utama

Alasan pemerintah Filipina memutuskan membuka kembali pangkalan militer milik Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA tahun 2014 adalah untuk menghadapi China dalam konflik Laut China Selatan. Kemudian alasan selanjutnya dibukanya kembali pangkalan militer milik Amerika Serikat oleh Filipina pada tahun 2014 adalah untuk menangani gelombang terorisme yang mulai mengancam di Filipina Selatan yang mana berdampak pada instabilitas politik di kawasan tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Akbar and Setiady 2009). Dengan mengacu pada definisi tersebut, penting bagi peneliti untuk menentukan langkah – langkah yang perlu penulis lakukan untuk melakukan penelitian ini agar lebih sistematis dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis membagi metode penelitian ini atas beberapa bagian. Antara lain teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian ini ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan

data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko and Achmadi 2009). Oleh karena itu, pemecahan masalah yang disajikan dalam penelitian ini akan lebih bersifat observasi data-data yang terkait dengan alasan Filipina meningkatkan kembali kerja sama militer dengan Amerika Serikat pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Data – data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis. Dari analisa dan interpretasi tersebut nantinya akan diperoleh gambaran yang lebih konkrit terkait hasil penelitian yang dilakukan.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih memilih pada teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan ini berupa pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Akbar and Setiady 2009). Hal ini dipilih penulis disebabkan terbatasnya biaya dan waktu penulis untuk melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang penulis teliti. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung menumpulkan data sekunder yang mana penulis kumpulkan dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun media online seperti situs berita dan dokumen terkait, selama masih relevan dan reliable dengan konteks yang penulis teliti.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini, analisis data merupakan suatu proses yang begitu penting bagi penulis. Karena pada tahap ini, teknik yang digunakan dalam menganalisis data menentukan hasil akhir dari karya tulis yang sedang disusun nantinya. Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif dan kualitatif dalam menyusun penelitian ini. teknik deskriptif dipilih karena data yang diperoleh dan diolah berasal dari data sekunder. Oleh karena itu teknik analisis data secara deskriptif paling membantu dan cocok bagi penulis dalam menginterpretasikan, menerjemahkan serta menggambarkan data-data yang penulis peroleh dan penulis olah dari berbagai sumber terkait yang ada. Sedangkan teknik kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut terjemahan dan prespektif peneliti sendiri (Akbar and Setiady 2009). Dengan demikian teknik analisis data deskriptif membantu penulis menggambarkan

fenomenanya, sedangkan pada teknik analisis data kualitatif membantu penulis memahami dan menafsirkan makna dan fenomena tersebut.

1.8 Sitematika Penulisan

Adapun dalam karya ilmiah ini, penulis akan menyusunnya berdasarkan sistematika yang dibedakan dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen utama, dan sistematika penulisan
- BAB II** Bab ini Penulis akan membahas perkembangan militer Filipina dan kerja sama yang dibangun oleh Filipina dengan Amerika Serikat khususnya di bidang militer
- BAB III** Bab ini Penulis membahas dinamika yang terjadi di kawasan Laut China Selatan dan Gelombang Terorisme yang mulai meningkat di kawasan Asia Pasifik
- BAB IV** Bab ini Penulis akan membahas alasan Filipina membuka kembali pangkalan militer Ameika Serikat dalam perjanjian EDCA tahun 2014
- BAB V** Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari karya ilmiah ini yang memuat kesimpulan lengkap berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya.

BAB 5. KESIMPULAN

Keputusan Filipina membuka kembali dan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer kepada Pasukan Amerika Serikat menunjukkan bahwa hubungan kedua negara khususnya kerja sama di bidang militer dan keamanan masih tetap kuat. Pasca ditutupnya pangkalan militer milik Amerika Serikat (Subic dan Clark) tidak merusak hubungan kerja sama kedua negara. Pangkalan tersebut dulunya merupakan kekuatan utama Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dalam menahan pengaruh komunisme pada waktu itu. Kedua negara pasca ditutupnya pangkalan militer, masih menjalin kerja sama militer seperti kerja sama Visiting Forces, Program Balikatan 2002-1. Kemudian Amerika juga masih memberikan bantuan seperti latihan militer bersama.

Beijing pada tahun 2009, secara mengejutkan mengeluarkan peta resmi mereka dan mengajukannya ke PBB. Peta sembilan garis putus – putus atau *nine-dash line* yang dikeluarkan China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan. klaim tersebut tentunya melanggar kedaulatan beberapa negara di kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan ZEE. Negara yang terkena klaim tersebut contohnya Filipina. Wilayah Filipina yang terkena klaim ialah di Kepulauan Spratly dan Scarborough. Beijing tidak hanya mengeluarkan peta (*nine-dash line*), mereka juga melakukan patroli di sekitar Laut China Selatan. Bahkan mereka telah menempatkan beberapa jenis kapal perang dan membangun pangkalan dan landasan pacu untuk pesawat mereka. Filipina telah merespon tindakan yang dilakukan oleh China di kawasan Laut China Selatan. Baik melalui *soft approaching* dan *hard approaching*. Akan tetapi pihak China tidak merespon dan tetap melanjutkan aktivitas mereka di Laut China Selatan.

Sengketa Laut China Selatan menjadi masalah yang sulit diselesaikan bagi Filipina, ditambah lagi konflik domestik yang belum terselesaikan di kawasan Filipina Selatan. Konflik panjang antara masyarakat muslim moro tersebut masih belum menemui titik temu dan malah melahirkan kelompok – kelompok baru yang jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Kelompok Seperti Abu Sayyaf Group semakin berkembang dan melakukan aksi penculikan, pembunuhan dan pemboman di sejumlah wilayah

Marawi Filipina Selatan. kekuatan militer Filipina menjadi terpecah karena dua konflik ini. Selain itu kekuatan militer Filipina saat ini masih tergolong lemah apabila harus menangani dua masalah tersebut secara bersamaan.

Oleh karena itu, kebijakan Filipina membuka kembali pangkalan Amerika Serikat dan memberikan akses ke sejumlah pangkalan militer kepada pasukan Amerika Serikat merupakan salah satu respon terhadap situasi - situasi internasional yang berdampak terhadap kondisi politik, ekonomi dan militer Filipina. Melalui Perjanjian EDCA, Filipina membawa kembali militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik secara masif pasca ditutupnya Pangkalan Subic dan Clark. Kehadiran pasukan Amerika Serikat tentunya akan menguntungkan bagi Filipina dalam menangani sengketa perbatasan dengan China di Laut China Selatan. Penguatan aliansi yang dibangun Filipina dengan Amerika Serikat melalui perjanjian EDCA akan meningkatkan posisi Filipina di sengketa Laut China Selatan melawan China. Filipina terbukti dibawah China soal kekuatan dan anggaran militer, Filipina juga tidak punya pengaruh kuat seperti China di kawasan Asia Pasifik, sehingga kehadiran Amerika Serikat dibelakang Filipina dapat mendongkrak posisi tawar Filipina dalam sengketa wilayah tersebut. Alasan lain yang membuat Filipina membuka kembali pangkalan militer Amerika Serikat adalah konflik domestik yang terjadi di Filipina Selatan oleh kelompok islam radikal seperti Kelompok Abu Sayyaf yang semakin meningkat pergerakannya pasca kelompok ekstrem di timur tengah terbentuk (ISIS). Aliansi Filipina – Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik tidak hanya membendung pengaruh China. Akan tetapi aliansi ini juga fokus terhadap penanganan terorisme yang mulai menyebar di kawasan Asia sejak ISIS dibentuk. Filipina memerlukan bantuan Amerika Serikat dalam peningkatan kapabilitas militer mereka. Dalam perjanjian EDCA Filipina juga diberikan bantuan militer oleh Amerika Serikat, seperti hibah alusista, finansial dan latihan militer selama 10 tahun ke depan. Sehingga dengan adanya perjanjian ini, Filipina dapat fokus menjaga *internal security dan territorial security* secara bersamaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Akbar, Usman Husnaini, dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amry, Ahmaf Almaududy. 2014. *"Problematika dan Prospek Penyelesaian Masalah. ." Laut Tiongkok Selatan*
- Coplin, William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke -2. Bandung: Sinar Baru.
- Hasbullah, Moeflich. 2003. *Asia Tenggara Kosentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media.
- Helmiati. 2008. *Dinamika Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: Suska Press.
- McDonald, Scoot B., dan Jonathan Lemco. 2011. *Asia's Rise in the 21st Century*. New York: Preager.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mas'oed, Mochtar. 1996. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal

- Bitzinger, Richard A. 1994. "The Globalization of the Arms Industry : the Next Proliferation Challenge." *International Securirty*. Hal 175 - 182.
- Castro, Renato Cruz De. 2014. "The 21st Century Philippine-US Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) : The Philippines' Policy in Facilitating the Obama Administration's Strategic Pivot to Asia." *The Korean Journal of Defense Analysis*. Hal 427-446.
- Chang, Felix K. 2012. "China Naval Rise and South China Sea : An Operational Assesment." *Foreign Policy*. Hal 19 - 38.
- Kingdon, Emma. 2015. "A case for Arbitration: The Philipines's Solution for the South China Sea Dispute." *Boston Collage International and Comparative Law Review* . Hal 131.
- Lisbet. 2012. "Peningkatan Kekuatan Militer China." *Info Hubungan Internasional*. Hal 5 - 8.

Satris, Rezki. 2015. "Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik." *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Hal 97 - 98.

Internet

- Abuza, Zachary. 2014. The Philippines Slowly Modernizes its Defense Capabilities. Juni 10. Diakses pada Juni 25, 2017. <https://www.cogitasia.com/the-philippines-slowly-modernizes-its-defense-capabilities/>.
- AMTI. 2016. Chinese Power Projection Capabilities in the South China Sea. Agustus 12. Diakses pada April 12, 2018. <https://amti.csis.org/chinese-power-projection/>.
- Batubara, Herianto. 2016. Jejak Berdarah Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf. Maret 31. Diakses pada April 12, 2019. <http://news.detik.com/berita/3176560/jejak-berdarah-penyanderaan-kelompok-abu-sayyaf>.
- BBC. 2015. Anggaran Pertahanan Jepang Terbesar Sepanjang Sejarah. Januari 14. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150114_jepang_pertahanan.
- . 2012. Filipina lelang daerah Laut China Selatan. Juli 31. Diakses pada Desember 10, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120731_southchinasea.shtml.
- BBC Indonesia. 2012. Filipina Menginginkan Militer AS yang Lebih Besar. Januari 27. Diakses pada Maret 27, 2017. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120127_filipina_as.shtml.
- BBC. 2015. "Pukulan bagi Cina dalam sengketa dengan Filipina." www.bbc.com. Oktober 30. Accessed November 23, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151029_dunia_cina_filipina.
- Bloomberg. 2014. Phillipines to Sign Defense Deal with US Amid China Tension. April 27. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-27/philippines-to-sign-defense-deal-withu-s-amid-china-tensions>.
- Briscoe. 2004. Balikatan exercise spearhead ARSOF operation in the Philippines. September 21. Accessed April 23, 2019. <http://elibraryusa.state.gov/primo?url=http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=AONE&sw=w&u=wash89460&v=2.1&id=GALE%7CA12619>.
- CISAC. 2018. cisac.fsi.stanford.edu. Agustus 12. Diakses pada April 18, 2019. <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/abu-sayyaf-group>.
- Clarke, Tara. 2015. Why Is the South China Sea Important ? Desember 23. <https://moneymorning.com/2015/12/23/why-is-south-china-sea-important/>.

- Cobus, Peter. 2017. Kepentingan Filipina di Laut China Selatan. Oktober 21. Diakses pada November 12, 2018. <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/philippines/>.
- Defense News. 2015. Philippines Hikes Defense Budget 25%. Juli 21. Diakses pada Mei 25, 2018. <https://www.defensenews.com/%20story/defense/policy-budget/budget/2015/07/21/philippines-hikes-defense-budget-25-percent-amid-south-china-sea-dispute--china/30464145/>.
- Dizon, Nikko. 2015. Filipinos asked : Who do you want on your side? Desember 13. <http://globalnation.inquirer.net/133741/filipinos-asked-who-do-you-want-on-your-side>.
- DW. 2012. ASEAN dan Laut China Selatan. November 11. <http://m.dw.com/id/asean-dan-laut-cina-selatan/a-16389640>.
- Ebbighausen, Rodion. 2012. US Puts More Emphasis on Southeast Asia. November 21. <http://www.dw.com/en/us-puts-more-emphasis-on-southeast-asia/a-16395882>.
- Gauga, Visali. 2015. Asia defense spending: New arms race in South China Sea. Mei 21. Diakses pada April 24, 2018 . <https://www.cnbc.com/2015/05/21/asia-defense-spending-new-arms-race-in-south-china-sea.html>.
- GFP. 2015. Country Military Strength detail. Januari 23. Accessed Desember 23, 2016. http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=philippines,
- . 2015. Philippines Military Strength. April 4. Diakses pada Mei 25, 2017. <https://www.globalfirepower.com/%20country-military-strength>
- GOVPH. 2010. Message of His Excellency Benigno S. Aquino III President of the Philippines to the Fifteenth Congress of the Philippines on the BUDget for 2011. Agustus 24. Diakses pada November 23, 2017. <http://www.gov.ph/2010/08/24/2011-budget-message-of-president-aquino/>.
- . 2013. mutual defense treaty between the republic of the philippines and the united states of america. Agustus 30. <http://www.gov.ph/1951/08/30/mutual-defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-1951/>.
- . 2012. statement of secretary del rosario regarding the philippines US mutual defense-treaty. Mei 9. <http://www.gov.ph/2012/05/09/statement-of-secretary-del-rosario-regarding-the-philippines-u-s-mutual-defense-treaty-may-9-2012/>.
- Hanifan, Aqwan Fiazi. 2017. ASEAN Mempercanggih Armada, Bersiap Hadapi China. Oktober 5. Diakses pada Januari 30, 2019. <https://tirto.id/asean-mempercanggih-armada-bersiaga-hadapi-cina-cxP5>.

- Huffington Post. 2014. US Aid and Human Rights Violations in Philippines. Februari 19. http://www.huffingtonpost.com/azadeh-shahshahani/us-aid-and-human-rightsv_b_4815877.html.
- International Crisis Group. 2013. "Stirring up the South China Sea III : A Fleeting Opportunity for Calm." www.crisisgroup.com. Juni 2. Diakses pada Desember 23, 2018. [https://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/north-east-asia/267-stirring-up-the-south-china-sea-iii-a-fleeting-opportunity-for-calm.pdf](https://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/north-east-asia/267-stirring-up-the-south-china-sea-iii-a-fleeting-opportunity-for-calm.pdf).
- Jacobson, Richrad. 2013. Modernizing the Philippine Military. Agustus 22. Diakses pada Juni 25, 2017. <https://thediplomat.com/2013/08/modernizing-the-philippine-military/>.
- jakarta greater. 2014. Militer Amerika Kembali ke Filipina. Diakses pada Oktober 9, 2016. <http://jakartagreater.com/militer-amerika-kembali-ke-filipina/>.
- Jamandre, Tessa. 2011. China Fired at Filipino Fishermen in Jackson Atoll. Juni 3. Diakses pada Desember 25, 2018. <https://news.abs-cbn.com/-depth/06/02/11/china-fired-filipino-fishermen-jackson-atoll>.
- Kaliwarang, Renne RS. 2009. Pembangunan Pangkalan Militer AS di Filipina. Diakses pada Agustus 20, 2016. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/40551-pembangunan-pangkalan-militer-as-di-filipina>.
- Kaplan, Robert D. 2015. Why the South Asia so Crucial? Februari 6. Diakses pada Agustus 12, 2018. <http://www.businessinside.com.au/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2>.
- Mukhti, MF. 2014. Pangkalan Militer Amerika di Filipina. Diakses pada Agustus 20, 2016. <http://historia.id/mondial/pangkalan-militer-amerika-di-filipina>.
- NYTimes. 2010. Reagan Remark On Philippines Assailed. Oktober 23. <http://www.nytimes.com/1984/10/23/world/reagan-remark-on-philippines-assailed.html>
- PBS. 2003. A Conflicted Land: Rebellion, Wars and Insurgencies in the Philippines. Juni 23. <http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/philippines/tl02.html>.
- Philstar. 2016. US - Philippines Agree 5 Base Locations Under EDCA. Maret 20. Diakses pada <http://www.philstar.com/headlines/2016/03/20/1564662/us-philippines-agree-5-baselocations-under-edca>.
- Portal HI. 2015. One Belt One Road Initiative: Discussion on Progress and Motivation. Oktober 5. Diakses pada 25 Maret 2018. <http://www.portal-hi.net/one-belt-one-road-initiative-discussions-on-progress-and-motivations/.html>
- Rosario, Albert Del. 2002. A Progress Report on the Phillipines: The Balikatan Exercises, the Abu Sayyaf and Al Qaeda. Maret 27. Diakses pada 25 April 2018. [:http://www.heritage.org/research/asianandthepacific/HI.748.cfm](http://www.heritage.org/research/asianandthepacific/HI.748.cfm).

- Shaw, David. 2014. The Philippine Army – Developing a Modernisation Strategy. Maret 3. Diakses pada : Agustus 12, 2018. <http://www.spslandforces.com/story/?id=305>.
- Statitics Times. 2014. World GDP Ranking 2014. Diakses pada: Desember 25, 2018. <http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php>.
- Storey, Ian. 2011. China and Philippines: Implication of The Reed Bank Incident. Mei 6. Diakses pada: Desember 25, 2018. <https://jamestown.org/program/china-and-the-philippines-implications-of-the-reed-bank-incident/>.
- Tempo. 2014. AS Filipina tandatangani Kerja sama Pertahanan Baru. April 28. Diakses pada: Oktober 9, 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2014/04/28/118573872/as-filipina-tanda-tangani-kerja-sama-pertahanan-baru>.
- The Daily Star. 2012. Philippines sends more troops to guard disputed islands. 10 1. Diakses pada 21, 2018. <https://www.thedailystar.net/news-detail-251997>.
- VOA Indonesia. 2016. Filipina Modernisasi Armada Angkatan Laut. Juni 2. Diakses pada Maret 29, 2017. <http://www.voaindonesia.com/a/filipina-modernisasi-armada-angkatan-laut/3358321.html>.
- Whaley, Floyd. 2011. clinton reaffirms militaryties with the philippines. November 17. Diakses pada Oktober 8, 2016. <http://www.nytimes.com/2011/11/17/world/asia/clinton-reaffirms-military-ties-with-the-philippines.html>.

Lampiran



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
AND
THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA
ON ENHANCED DEFENSE COOPERATION**

PREAMBLE

The Government of the Republic of the Philippines ("the Philippines"), and the Government of the United States of America (the "United States"), hereinafter referred to jointly as "the Parties" and individually as a "Party";

Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to strengthen international and regional security;

Recalling and in furtherance of the Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America (the "MDT"), signed at Washington on August 30, 1951, and the Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America Regarding the Treatment of United States Armed Forces Visiting the Philippines (the "VFA"), signed in Manila on the tenth day of February 1998;

Recalling further Article I of the MDT, which states, "The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purposes of the United Nations.";

Affirming that the Parties share an understanding for the United States not to establish a permanent military presence or base in the territory of the Philippines;

Recalling the Agreement for the Establishment of a Mutual Defense Board ("MDB"), concluded by exchange of notes at Manila on May 15, 1958, and the Agreement to Establish a Security Engagement Board ("SEB"), concluded by exchange of notes at Manila on April 11 and 12, 2006;

Recalling further the Mutual Logistics Support Agreement between the Department of National Defense of the Republic of the Philippines and the Department of Defense of the United States of America (the "MLSA"), with Annexes, signed at Quezon City on November 8, 2007, as extended;

Recalling the Parties' respective international obligations, including those provided under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction;

Recognizing that all United States access to and use of facilities and areas will be at the invitation of the Philippines and with full respect for the Philippine Constitution and Philippine laws;

Desiring to enhance cooperative capacities and efforts in humanitarian assistance and disaster relief;

Have agreed as follows:

Article I PURPOSE AND SCOPE

1. This Agreement deepens defense cooperation between the Parties and maintains and develops their individual and collective capacities, in furtherance of Article II of the MDT, which states that "the Parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack," and within the context of the VFA. This includes:

(a) Supporting the Parties' shared goal of improving interoperability of the Parties' forces, and for the Armed Forces of the Philippines ("AFP"), addressing short-term capabilities gaps, promoting long-term modernization, and helping maintain and develop additional maritime security, maritime domain awareness, and humanitarian assistance and disaster relief capabilities; and

(b) Authorizing access to Agreed Locations in the territory of the Philippines by United States forces on a rotational basis, as mutually determined by the Parties.

2. In furtherance of the MDT, the Parties mutually agree that this Agreement provides the principal provisions and necessary authorizations with respect to Agreed Locations.

3. The Parties agree that the United States may undertake the following types of activities in the territory of the Philippines in relation to its access to and use of Agreed Locations: security cooperation exercises; joint and combined training activities; humanitarian assistance and disaster relief activities; and such other activities as may be agreed upon by the Parties.

Article II DEFINITIONS

1. "United States personnel" means United States military and civilian personnel temporarily in the territory of the Philippines in connection with activities approved by the Philippines, as those terms are defined in the VFA.

2. "United States forces" means the entity comprising United States personnel and all property, equipment, and materiel of the United States Armed Forces present in the territory of the Philippines.

3. "United States contractors" means companies and firms, and their employees, under contract or subcontract to or on behalf of the United States Department of Defense. United States contractors are not included as part of the definition of United States personnel in this Agreement, including within the context of the VFA.

4. "Agreed Locations" means facilities and areas that are provided by the Government of the Philippines through the AFP and that United States forces, United States contractors, and others as mutually agreed, shall have the right to access and use pursuant to this Agreement. Such Agreed Locations may be listed in an annex to be appended to this Agreement, and may be further described in implementing arrangements.

5. "Designated Authorities" means, respectively, the Philippine Department of National Defense, unless the Philippines otherwise provides written notice to the United States, and the United States Department of Defense, unless the United States otherwise provides written notice to the Philippines.

AGREED LOCATIONS

1. With consideration of the views of the Parties, the Philippines hereby authorizes and agrees that United States forces, United States contractors, and vehicles, vessels, and aircraft operated by or for United States forces may conduct the following activities with respect to Agreed Locations: training; transit; support and related activities; refueling of aircraft; bunkering of vessels; temporary maintenance of vehicles, vessels, and aircraft; temporary accommodation of personnel; communications; prepositioning of equipment, supplies, and materiel; deploying forces and materiel; and such other activities as the Parties may agree.
2. When requested, the Designated Authority of the Philippines shall assist in facilitating transit or temporary access by United States forces to public land and facilities (including roads, ports, and airfields), including those owned or controlled by local governments, and to other land and facilities (including roads, ports, and airfields).
3. Given the mutuality of benefits, the Parties agree that the Philippines shall make Agreed Locations available to United States forces without rental or similar costs. United States forces shall cover their necessary operational expenses with respect to their activities at the Agreed Locations.
4. The Philippines hereby grants to the United States, through bilateral security mechanisms, such as the MDB and SEB, operational control of Agreed Locations for construction activities and authority to undertake such activities on, and make alterations and improvements to, Agreed Locations. United States forces shall consult on issues regarding such construction, alterations, and improvements based on the Parties' shared intent that the technical requirements and construction standards of any such projects undertaken by or on behalf of United States forces should be consistent with the requirements and standards of both Parties.
5. The Philippine Designated Authority and its authorized representative shall have access to the entire area of the Agreed Locations. Such access shall be provided promptly consistent with operational safety and security requirements in accordance with agreed procedures developed by the Parties.
6. United States forces shall be responsible on the basis of proportionate use for construction, development, operation, and maintenance costs at Agreed Locations. Specific funding arrangements may be defined in implementing arrangements.

Article IV
EQUIPMENT, SUPPLIES, AND MATERIEL


1. The Philippines hereby authorizes United States forces, through bilateral security mechanisms, such as the MDB and SEB, to preposition and store defense equipment, supplies, and materiel ("prepositioned materiel"), including, but not limited to, humanitarian assistance and disaster relief equipment, supplies, and materiel, at Agreed Locations. United States forces shall notify the AFP in advance regarding the quantities and delivery schedules of defense equipment, supplies, and materiel that United States forces intend to preposition in Agreed Locations, as well as who will make such deliveries.
2. The Parties share a recognition of the benefits that such prepositioning could have for humanitarian assistance and disaster relief. The Parties also recognize the value of such prepositioning to the enhancement of their individual and collective defense capabilities.
3. The prepositioned materiel of United States forces shall be for the exclusive use of United States forces, and full title to all such equipment, supplies, and materiel remains with the United States. United States forces shall have control over the access to and disposition of such prepositioned materiel and shall have the unencumbered right to remove such prepositioned materiel at any time from the territory of the Philippines.
4. United States forces and United States contractors shall have unimpeded access to Agreed Locations for all matters relating to the prepositioning and storage of defense equipment, supplies, and materiel, including delivery, management, inspection, use, maintenance, and removal of such equipment, supplies and materiel.
5. The Parties share an intent that United States contractors may carry out such matters in accordance with, and to the extent permissible under, United States laws, regulations, and policies.
6. The prepositioned materiel shall not include nuclear weapons.

Article V
OWNERSHIP

1. The Philippines shall retain ownership of and title to Agreed Locations.
2. The United States shall return to the Philippines any Agreed Locations, or any portion thereof, including non-relocatable structures and assemblies constructed, modified, or improved by the United States, once no longer required by United States forces for activities under this Agreement. The Parties or the Designated Authorities shall consult regarding the terms of return of any Agreed Locations, including possible compensation for improvements or construction.
3. United States forces and United States contractors shall retain title to all equipment, materiel, supplies, relocatable structures, and other moveable property that have been imported into or acquired within the territory of the Philippines by or on behalf of United States forces.
4. All buildings, non-relocatable structures, and assemblies affixed to the land in the Agreed Locations, including ones altered or improved by United States forces, remain the property of the Philippines. Permanent buildings constructed by United States forces become the property of the Philippines, once constructed, but shall be used by United States forces until no longer required by United States forces.
5. The Parties may consult regarding the possible transfer or purchase of equipment determined to be excess, as may be allowed by United States laws and regulations.

Article VI
SECURITY

1. The Parties shall cooperate to take such measures as may be necessary to ensure the protection, safety, and security of United States forces and United States contractors, and the protection and security of official United States information in the territory of the Philippines.
2. The Philippines retains primary responsibility for security with respect to Agreed Locations.
3. United States forces are authorized to exercise all rights and authorities within Agreed Locations that are necessary for their operational control or defense,



including taking appropriate measures to protect United States forces and United States contractors. The United States should coordinate such measures with appropriate authorities of the Philippines.

4. The Parties shall take all reasonable measures to ensure the protection, safety, and security of United States property from seizure by or conversion to the use of any party other than the United States, without the prior written consent of the United States.

Article VII UTILITIES AND COMMUNICATIONS

1. The Philippines hereby grants to United States forces and United States contractors the use of water, electricity, and other public utilities on terms and conditions, including rates or charges, no less favorable than those available to the AFP or the Government of the Philippines in like circumstances, less charges for taxes and similar fees, which will be for the account of the Philippine Government. United States forces' costs shall be equal to their pro rata share of the use of such utilities.

2. The Parties recognize that it may be necessary for United States forces to use the radio spectrum. The Philippines authorizes the United States to operate its own telecommunication systems (as telecommunication is defined in the 1992 Constitution and Convention of the International Telecommunication Union ("ITU")). This shall include the right to utilize such means and services as required to ensure the full ability to operate telecommunication systems, and the right to use all necessary radio spectrum allocated for this purpose. Consistent with the 1992 Constitution and Convention of the ITU, United States forces shall not interfere with frequencies in use by local operators. Use of the radio spectrum shall be free of cost to the United States.

Article VIII CONTRACTING PROCEDURES

1. United States forces may contract for any materiel, supplies, equipment, and services (including construction) to be furnished or undertaken in the territory of the Philippines without restriction as to choice of contractor, supplier, or person who provides such materiel, supplies, equipment, or services. Such contracts shall be solicited, awarded, and administered in accordance with the laws and regulations of the United States.



2. United States forces shall strive to use Philippine suppliers of goods, products, and services to the greatest extent practicable in accordance with the laws and regulations of the United States.

Article IX
ENVIRONMENT, HUMAN HEALTH, AND SAFETY

1. The Parties recognize and acknowledge the importance of protection of the environment and human health and safety in the context of activities covered by this Agreement and agree to implement this Agreement in a manner consistent with the protection of the natural environment and human health and safety and to pursue a preventative rather than reactive approach to environmental protection. To this end, the Parties shall cooperate to ensure problems that may arise are dealt with immediately in order to prevent any lasting damage to the environment or endangerment of human health and safety.
2. The United States confirms its intent to respect relevant Philippine environmental, health, and safety laws, regulations, and standards in the execution of its policies. The Philippines confirms its policy to implement environmental, health, and safety laws, regulations, and standards with due regard for the health and safety of United States forces and United States contractors. The Parties shall fully cooperate in the timely exchange between the competent representatives of the Parties of all relevant existing information concerning environmental and health protection at Agreed Locations. The environmental compliance standards applied by United States forces shall reflect, in accordance with its policies, the more protective of United States, Philippine, or applicable international agreement standards. To that end, during the development and periodic review of such environmental practices, the Parties shall cooperate and consult to ensure that Philippine standards are accurately reflected.
3. United States forces shall not intentionally release any hazardous materials or hazardous waste owned by it, and, if a spill occurs, shall expeditiously take action in order to contain and address environmental contamination resulting from the spill.

Article X
IMPLEMENTATION

1. All obligations under this Agreement are subject to the availability of appropriated funds authorized for these purposes.
2. As appropriate, the Parties or the Designated Authorities may enter into implementing arrangements to carry out the provisions of this Agreement, including with respect to activities at Agreed Locations and funding. Implementing arrangements concluded by the Designated Authorities shall enter into force upon the date of their signature.
3. Implementing arrangements may address additional details concerning the presence of United States forces at Agreed Locations and the functional relations between United States forces and the AFP with respect to Agreed Locations.
4. The Parties or their Designated Authorities intend to consult regularly concerning the implementation of this Agreement.

Article XI
RESOLUTION OF DISPUTES

The Parties agree to resolve any dispute arising under this Agreement exclusively through consultation between the Parties. Disputes and other matters subject to consultation under this Agreement shall not be referred to any national or international court, tribunal, or other similar body, or to any third party for settlement, unless otherwise agreed by the Parties.

Article XII
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT, DURATION, AND
TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last note exchanged between the Parties, through diplomatic channels, confirming the completion of all necessary internal procedures required for the entry into force thereof.
2. This Agreement, including any annex, may be amended by written agreement of the Parties, and such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.

f

PLM

3. Any annex appended to this Agreement shall form an integral part of this Agreement.

4. This Agreement shall have an initial term of ten years, and thereafter, it shall continue in force automatically unless terminated by either Party by giving one year's written notice through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Quezon City, in duplicate in English, this 28th day of April, 2014.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES:



FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

